

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Era digitalisasi telah membawa perubahan yang signifikan dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk dalam aspek tata kelola keuangan daerah. Kemajuan teknologi menjadi yang terdepan dalam transformasi digital pemerintah daerah. Perkembangan teknologi sangat dibutuhkan untuk menjaga perekonomian pemerintah tetap stabil melalui berkembangnya berbagai sektor kinerja dan adanya era baru dalam sistem pengelolaan keuangan daerah, terutama pada organisasi sektor publik. Organisasi sektor publik berbentuk lembaga-lembaga negara, pemerintah atau organisasi yang bergerak dibidang pelayanan dan penyelenggaraan negara dalam rangka pelaksanaan konstitusi negara terkait dengan keuangan pemerintah daerah (Marwati & Pratiwi, 2023). Digitalisasi juga mendukung integrasi data keuangan yang lebih akurat, mempercepat pengambilan keputusan serta membantu meminimalkan terjadinya kesalahan dalam pengelolaan keuangan daerah. Pengelolaan keuangan daerah memegang peran penting dalam mendukung strategi pemberdayaan pemerintah daerah, khususnya dalam pelaksanaan otonomi daerah dan mewujudkan desentralisasi yang luas, nyata, dan bertanggung jawab.

Pemberian hak otonomi daerah memungkinkan pemerintah daerah dapat mengatur dan mengelola sendiri pemerintahannya dengan mengambil kebijakan dalam memajukan daerah sesuai ketentuan perundang-undangan.

Tingginya tuntutan terhadap kinerja dan akuntabilitas pemerintah daerah dalam pengelolaan keuangan daerah, memunculkan adanya kebutuhan akuntansi sebagai alat untuk mencatat dan melaporkan kinerja pemerintah guna meningkatkan kinerja yang baik. Pemerintah daerah dituntut untuk menjalankan kinerja pemerintah yang efektif dengan meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan pemerataan pembangunan daerah melalui pengelolaan keuangan yang baik serta pengembangan seluruh potensi yang dimiliki daerah (Prihatin et al., 2020). Keberhasilan suatu pemerintah di era otonomi daerah dapat diukur melalui berbagai indikator kinerja yang telah dicapai, termasuk indikator efisiensi pada pengelolaan keuangan daerah. Untuk menilai sejauh mana kualitas pengelolaan keuangan daerah maka diperlukan adanya pengukuran kinerja keuangan mengenai Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dan Laporan Keuangan Daerah.

Pengukuran kinerja keuangan merupakan suatu proses penilaian dan evaluasi akuntabilitas pemerintah daerah dalam pengelolaan keuangan publik. Kinerja keuangan ini mencerminkan hasil pencapaian kerja pemerintah dalam bidang keuangan yang mencakup penerimaan, pengeluaran, dan efisiensi keuangan. Kinerja keuangan pemerintah daerah dapat diukur dengan menggunakan teknik dalam menganalisis laporan keuangan pemerintah daerah, yaitu analisis rasio keuangan berupa perhitungan terhadap Laporan Realisasi Anggaran (LRA) sebagai hasil dari laporan pertanggungjawaban Kepala Daerah dalam pelaksanaan pengelolaan daerah atas entitasnya. Analisis rasio keuangan dilakukan dengan

membandingkan hasil pada 1 periode dengan periode sebelumnya, sehingga dapat diidentifikasi pola atau kecenderungan yang terjadi. Pengukuran kinerja keuangan ini, sangat penting dalam menilai akuntabilitas keuangan daerah dengan kemampuan menunjukkan sejauh mana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dapat dikelola dan dibelanjakan secara efisien, efektif dan ekonomis (Andirfa, 2018).

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) merupakan dokumen perencanaan kerja tahunan pemerintah daerah mencakup keseluruhan pendapatan, belanja, dan pembiayaan dalam kurun waktu 1 tahun yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Seluruh penerimaan dan pengeluaran keuangan daerah harus dicatat dan dikelola pada APBD. Laporan keuangan berfungsi untuk membandingkan antara realisasi pendapatan, belanja, transfer, dan pembiayaan dengan anggaran yang telah ditetapkan. Laporan keuangan juga merupakan bentuk pertanggungjawaban atas penggunaan sumber daya dan sumber dana. Salah satu bentuk laporan tersebut adalah Laporan Realisasi Anggaran (LRA) yang menunjukkan akuntabilitas dan kepatuhan terhadap APBD. LRA yang dikelola oleh pemerintah daerah memberikan informasi mengenai penggunaan anggaran dalam periode pelaporan dengan menyajikan informasi ringkas mengenai sumber penerimaan, alokasi dana, serta sumber daya ekonomi selama periode pelaporan (Santoso et al., 2021).

Kabupaten Brebes merupakan daerah otonom yang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 Tentang Pembentukan

Daerah-Daerah Kabupaten. Kabupaten Brebes menjadi salah satu kabupaten yang memiliki beragam sumber daya dari berbagai sektor, tetapi dalam pengelolaan keuangan daerah masih belum berjalan secara optimal. Terdapat beberapa tantangan yang dihadapi oleh pemerintah daerah dalam pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), seperti efektivitas alokasi anggaran, realisasi belanja, dan keseimbangan antara penerimaan dan pengeluaran. Hasil dari penelitian sebelumnya, Kabupaten Brebes sudah menunjukkan kriteria yang baik, namun pada kriteria atau tingkat efisiensi masih kurang baik disebabkan pengeluaran belanja lebih besar dibandingkan dengan penerimaan pendapatannya. Perencanaan anggaran pendapatan dibuat lebih rendah dari potensi pendapatan riil yang dapat diperoleh, sehingga pada tahap pelaporan realisasi anggaran, diharapkan nilai realisasi pendapatan akan melampaui target anggaran pendapatan yang telah ditetapkan. Sementara itu, belanja daerah cenderung rawan terjadi inefisiensi, sehingga alokasi anggaran belanja dibuat lebih tinggi dibandingkan dengan potensi realisasi belanja yang sebenarnya terjadi (Prihatin et al., 2020).

Dalam pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Brebes tersebut, sering kali terjadi serapan anggaran yang tidak optimal, terutama dalam belanja modal dan infrastruktur yang disebabkan oleh perencanaan kurang matang, kendala administrasi, dan adanya surplus atau defisit anggaran. Selain itu, hasil yang ditunjukkan dari realisasi pendapatan Pemerintah Kabupaten Brebes menurut jenis

pendapatan tahun 2020-2022, Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Brebes masih relatif kecil dibandingkan dengan total APBD. Sebagian besar pendapatan masih bergantung pada Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK) dari pemerintah pusat. Pendapatan Asli Daerah yang diterima setiap tahun mengalami kenaikan dan penurunan pendapatan (fluktuasi). Peningkatan ini dapat digunakan untuk kepentingan dan kebutuhan dalam kesejahteraan masyarakat. Penurunan yang signifikan pada Pendapatan Asli Daerah (PAD) mencerminkan aktivitas daerah dalam menghasilkan PAD yang rendah (Indriani et al., 2023).

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, peneliti tertarik melakukan penelitian guna mengetahui sejauh mana pemerintah daerah khususnya Kabupaten Brebes dalam pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang dialokasikan apakah dimanfaatkan secara optimal untuk mencapai tujuan pembangunan daerah. Dari uraian tersebut peneliti melakukan penelitian dengan judul: **“Analisis Kinerja Keuangan pada Pemerintah Daerah Kabupaten Brebes Tahun Anggaran 2020-2024”**

1.2 Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka dapat diambil rumusan masalah pada penelitian ini yaitu, bagaimana kinerja keuangan pada Pemerintah Daerah Kabupaten Brebes Tahun Anggaran 2020-2024 berdasarkan analisis rasio keuangan?

1.3 Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kinerja keuangan pada Pemerintah Daerah Kabupaten Brebes Tahun Anggaran 2020-2024 berdasarkan analisis rasio keuangan.

1.4 Manfaat Penelitian

Dengan adanya penelitian ini, banyak manfaat yang dapat diambil sebagai bahan ajar dan pengetahuan penulis, serta dapat juga memberikan manfaat bagi masyarakat luas. Manfaat penelitian tersebut adalah sebagai berikut:

1. Bagi Peneliti

Melalui penelitian ini, diharapkan dapat memperoleh pengalaman ilmu pengetahuan serta pemikiran secara mendalam bagi peneliti terkait analisis kinerja keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Brebes. Peneliti dapat meningkatkan wawasan mengenai konsep pengelolaan keuangan daerah pada pemerintah daerah. Selain itu, hasil dari penelitian ini dapat memberikan kontribusi terhadap akademik yang digunakan sebagai referensi bagi penelitian selanjutnya yang berkaitan dengan keuangan daerah.

2. Bagi Pemerintah Daerah Kabupaten Brebes

Dari hasil penelitian ini, Pemerintah Daerah Kabupaten Brebes dapat mengetahui kinerja keuangan pemerintah dalam pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan memberikan gambaran tentang sejauh mana pengelolaan keuangan daerah sesuai dengan

ketentuan. Diharapkan untuk dapat dijadikan sebagai masukan dan bahan pertimbangan guna meningkatkan efisiensi kinerja dalam melakukan pengelolaan daerah serta mendorong peningkatan transparansi dalam pelaporan keuangan daerah.

3. Bagi Politeknik Harapan Bersama

Dapat menambah literatur akademik yang dijadikan sebagai referensi bagi pembaca di perpustakaan Politeknik Harapan Bersama maupun melalui media sosial, sehingga dapat bermanfaat bagi penelitian selanjutnya dan digunakan sebagai acuan untuk studi pada bidang yang sama secara lebih mendalam.

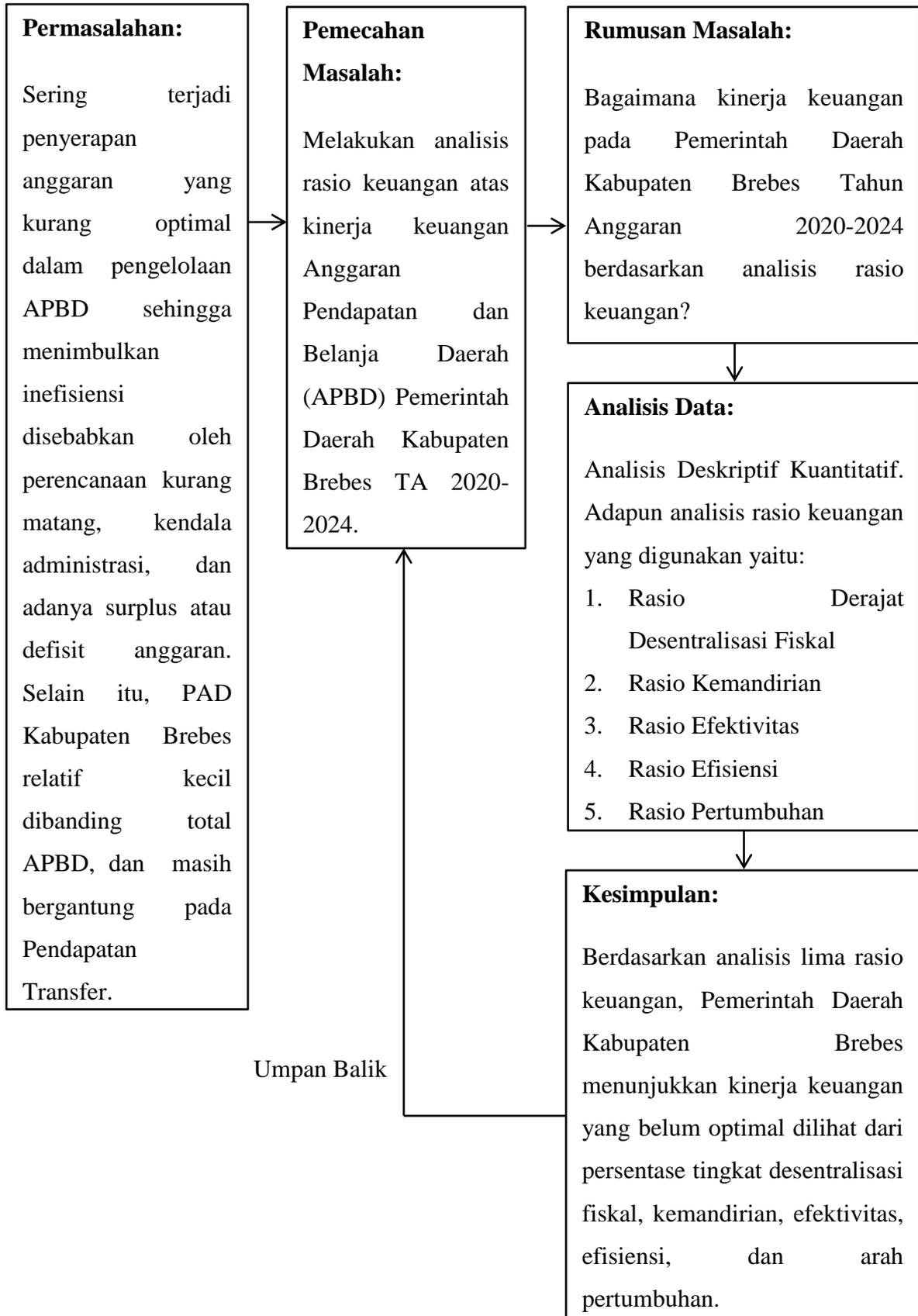
1.5 Batasan Masalah

Batasan masalah digunakan untuk memberikan pembahasan yang terfokus dan menghindari adanya perluasan pokok permasalahan dalam penelitian, sehingga tujuan dari penelitian dapat tercapai. Batasan masalah ini hanya membahas mengenai kinerja keuangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dengan menggunakan perhitungan rasio keuangan, yaitu Rasio Derajat Desentralisasi Fiskal, Rasio Kemandirian, Rasio Efektivitas, Rasio Efisiensi, dan Rasio Pertumbuhan pada Pemerintah Daerah Kabupaten Brebes. Perhitungan dilakukan dengan menganalisis rasio terhadap Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang telah ditetapkan dan dilaksanakan pada periode 2020-2024.

1.6 Kerangka Berpikir

Analisis kinerja keuangan daerah merupakan proses evaluasi terhadap pengelolaan keuangan daerah dalam jangka waktu tertentu. Dalam pengelolaan keuangan daerah Kabupaten Brebes sering kali terjadi serapan anggaran yang tidak optimal, terutama dalam belanja modal dan infrastruktur yang disebabkan oleh perencanaan kurang matang, kendala administrasi, dan adanya surplus atau defisit anggaran. Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Brebes masih relatif kecil dibandingkan dengan total APBD. Sebagian besar sumber pendapatan masih didominasi oleh ketergantungan terhadap Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK) dari pemerintah pusat. Pengukuran kinerja keuangan dalam penelitian ini digunakan sebagai alat untuk menilai seberapa optimal pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Pemerintah Daerah Kabupaten Brebes dari periode 2020-2024. Pengukuran dilakukan dengan menganalisis Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dengan menggunakan perhitungan 5 rasio keuangan yaitu Rasio Derajat Desentralisasi Fiskal, Rasio Kemandirian, Rasio Efektivitas, Rasio Efisiensi, dan Rasio Pertumbuhan.

Berdasarkan penjelasan tersebut, maka dapat dilakukan penyederhanaan menggunakan kerangka berpikir penelitian sebagai berikut:



Gambar 1. Kerangka Berpikir

1.7 Sistematika Penulisan

Dalam penulisan Proposal Tugas Akhir, dibuat sistematika penulisan agar mudah untuk dipahami dan memberikan gambaran secara umum kepada pembaca. Berikut adalah sistematika penulisan Proposal Tugas Akhir:

1. Bagian Awal

Bagian awal berisi halaman judul, halaman persetujuan, halaman pengesahan, halaman pernyataan Tugas Akhir (TA). Halaman pernyataan persetujuan publikasi karya ilmiah untuk kepentingan akademis, halaman persembahan, halaman motto, kata pengantar, intisari atau abstrak, daftar isi, daftar tabel, daftar gambar, daftar lampiran. Bagian awal ini disusun untuk memberikan kemudahan kepada pembaca dalam menemukan bagian-bagian penting secara cepat.

2. Bagian isi terdiri dari 5 bab, yaitu:

BAB I PENDAHULUAN

Pada bab pendahuluan berisi latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, batasan masalah, kerangka berpikir dan sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Pada bab ini berisi kajian pustaka atau landasan teori yang memuat penjelasan mengenai konsep dan prinsip dasar yang

diperlukan untuk memecahkan masalah penelitian. Pada penelitian ini berisi definisi kinerja keuangan, teori kinerja keuangan daerah, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), Laporan Keuangan Daerah, analisis rasio keuangan, dan penelitian terdahulu yang digunakan sebagai acuan dan referensi penulis.

BAB III METODE PENELITIAN

Pada bab metode penelitian berisi lokasi penelitian (tempat dan alamat penelitian), waktu penelitian, jenis dan sumber data, metode pengumpulan data, metode analisis data, luaran serta jadwal penelitian.

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

Bab ini berisi tentang hasil penelitian dan pembahasan hasil penelitian.

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan berisi tentang garis besar dan inti hasil penelitian serta saran dari peneliti yang diharapkan dapat berguna bagi instansi atau perusahaan.

DAFTAR PUSTAKA

Daftar pustaka berisi tentang daftar buku, *literature* yang berkaitan dengan penelitian. Referensi pustaka yang digunakan adalah jurnal penelitian yang terbit dalam kurun waktu 5 tahun terakhir dan buku yang terbit dalam kurun

waktu 10 tahun terakhir. Lampiran berisi data yang mendukung penelitian Tugas Akhir secara lengkap.

3. Bagian Akhir

LAMPIRAN

Lampiran berisi informasi tambahan yang mendukung kelengkapan laporan serta data-data lain yang diperlukan. Dapat juga berupa gambar, perhitungan-perhitungan, grafik, atau tabel, yang merupakan bagian rinci dari apa yang disajikan di bagian terkait sebelumnya.